



Strategi Optimalisasi Transformasi Digital Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan: Isu Kebijakan Nasional

OLEH:

BRIGJEN POL. CHAIDIR, SH, SIK, M.Si, MPP, MHan
SESTAMA LEMHANNAS RI

BANDUNG, 31 JULI 2024



BIODATA

Nama

Brigjen Pol. CHAIDIR, SH, SIK, M.Si, MPP, M.Han.

Jabatan

TENAGA PENGAJAR MADYA LEMHANNAS RI

Pendidikan

1. AKPOL 1992
2. PTIK 2001
3. SESPIM 2007
4. SESKO TNI 2020
5. LEMHANNAS PPSA XXIV/2023

Riwayat Jabatan

- ATASE POLRI KUALA LUMPUR DIVHUBINTER POLRI (2016–2019)
- KABAGKOMINTER SET NCB DIVHUBINTER POLRI (2020–2022)
- TENAGA PENGKAJI MADYA WASANTARA LEMHANNAS RI (2022–2023)
- DIRJIAN SOSBUD DAN DEMOGRAFI DEPUTI PENGKAJIAN STRATEGI LEMHANNAS RI (2023–2024)
- TENAGA PENGAJAR MADYA LEMHANNAS RI (2024–SEKARANG)

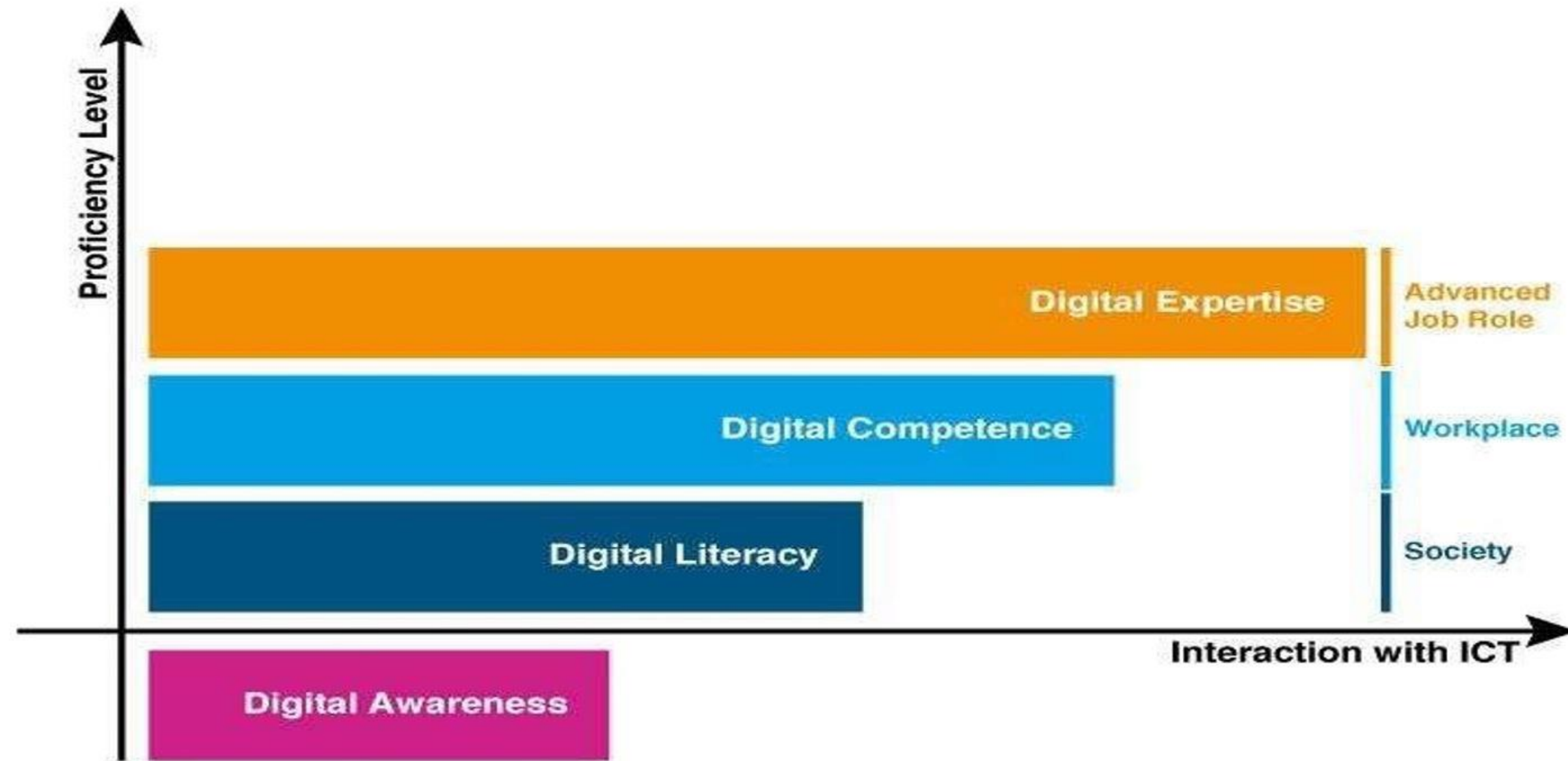




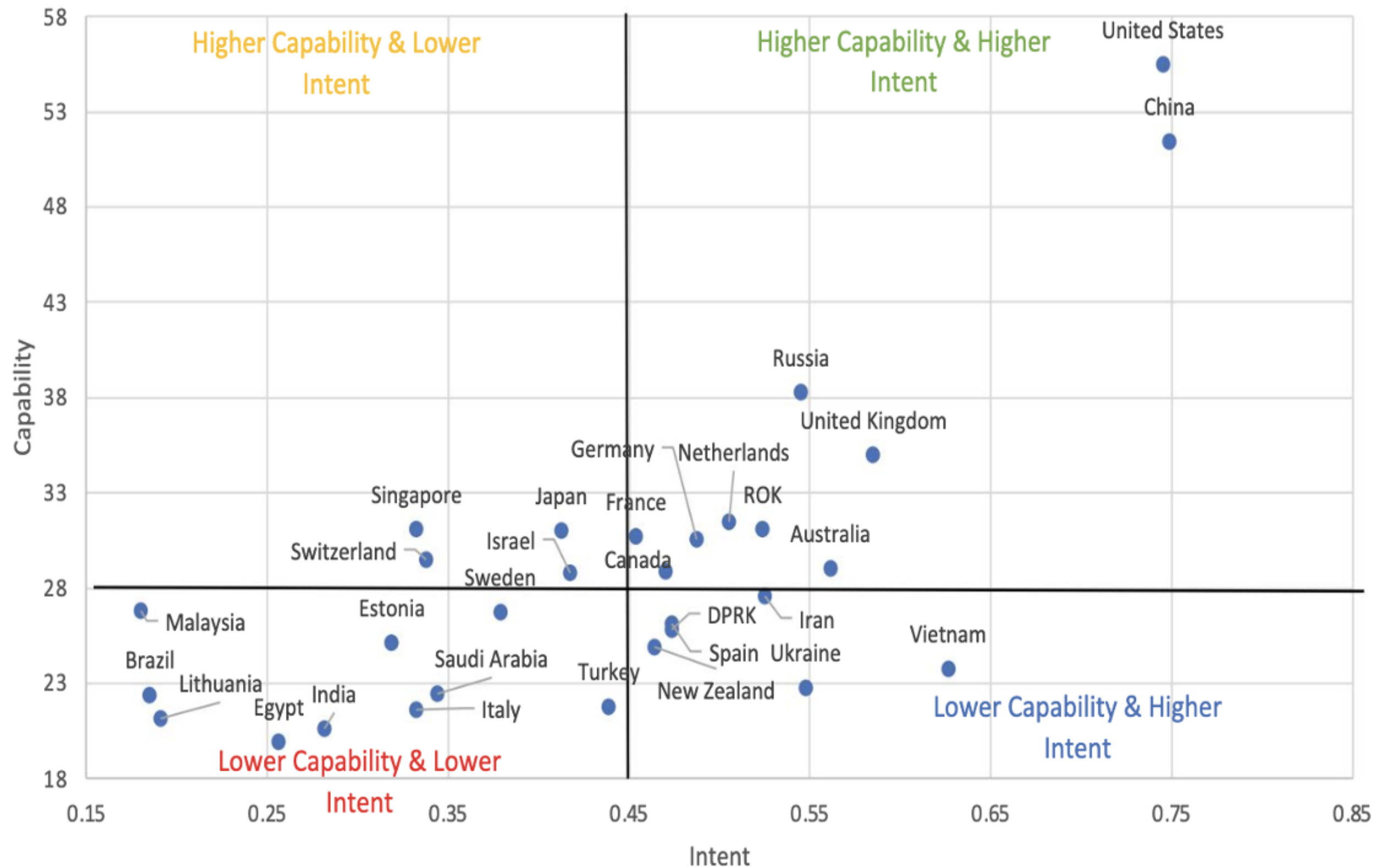
Transformasi Digital

Transformasi digital merujuk pada perubahan signifikan dalam pemerintahan dan masyarakat menuju adopsi dan integrasi teknologi digital ke dalam berbagai proses dan layanan. Ini melibatkan pemikiran ulang tentang bagaimana pemerintah dapat memberikan dukungan dan layanan vital secara jarak jauh.

Tingkatan Literasi Digital

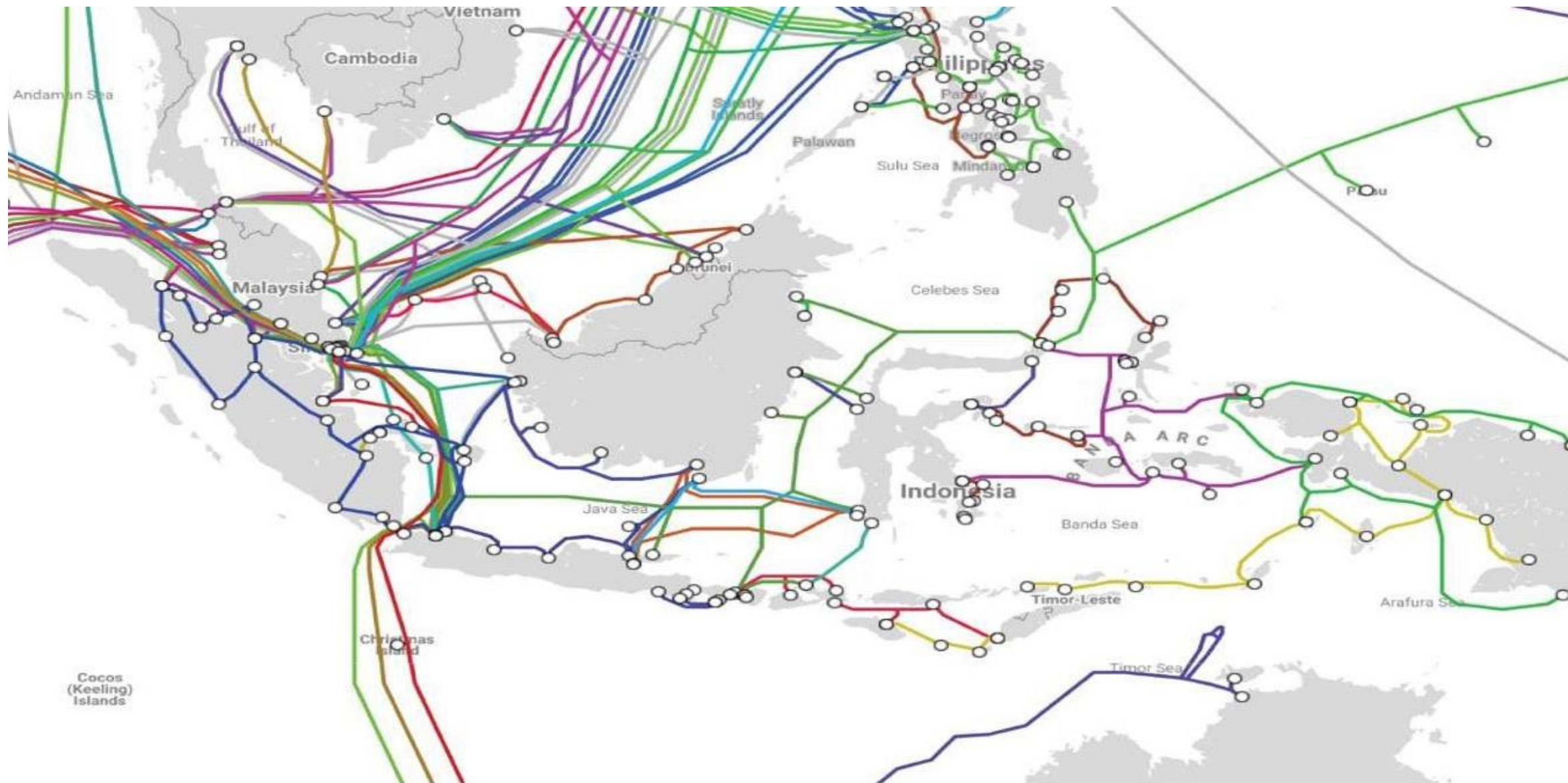


Grafik Scatter Plot *Capability VS Intent*



Sumber: *National Cyber Power Index 2022*

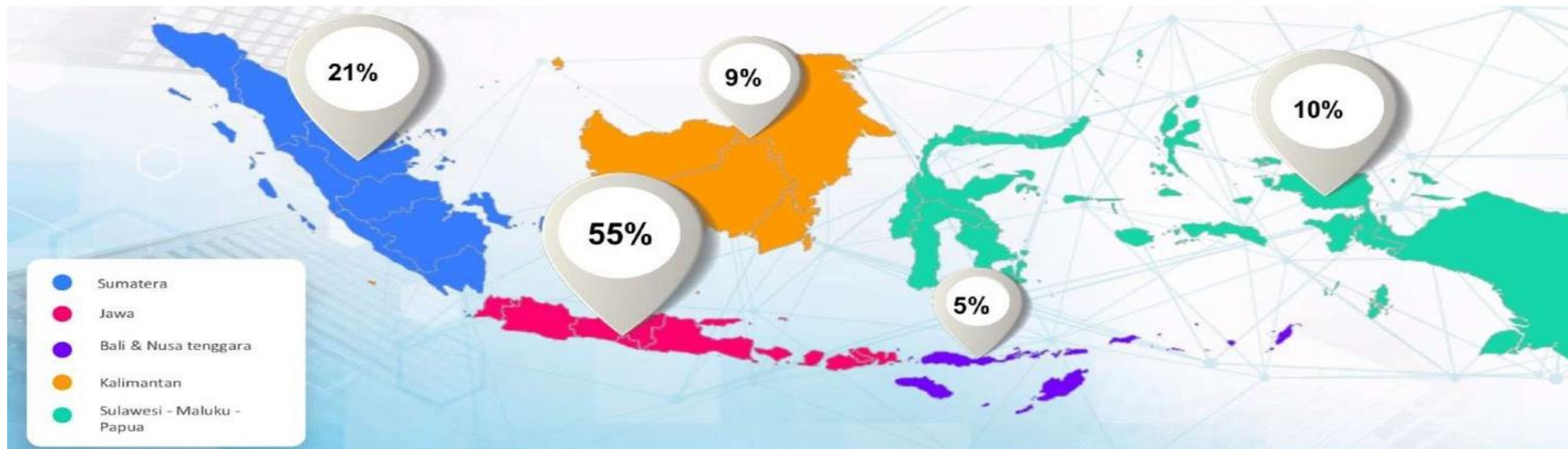
KESENJANGAN DIGITAL



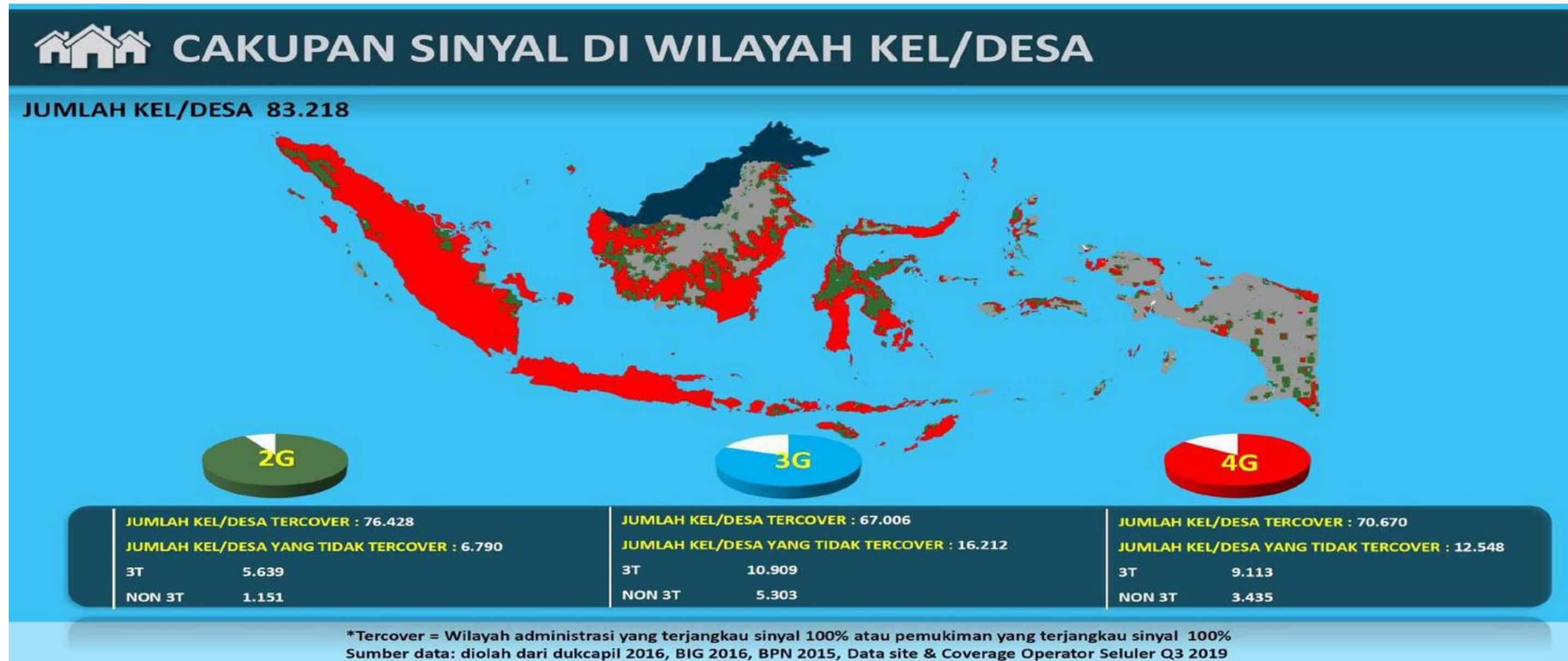
Sumber: submarinecablemap.com



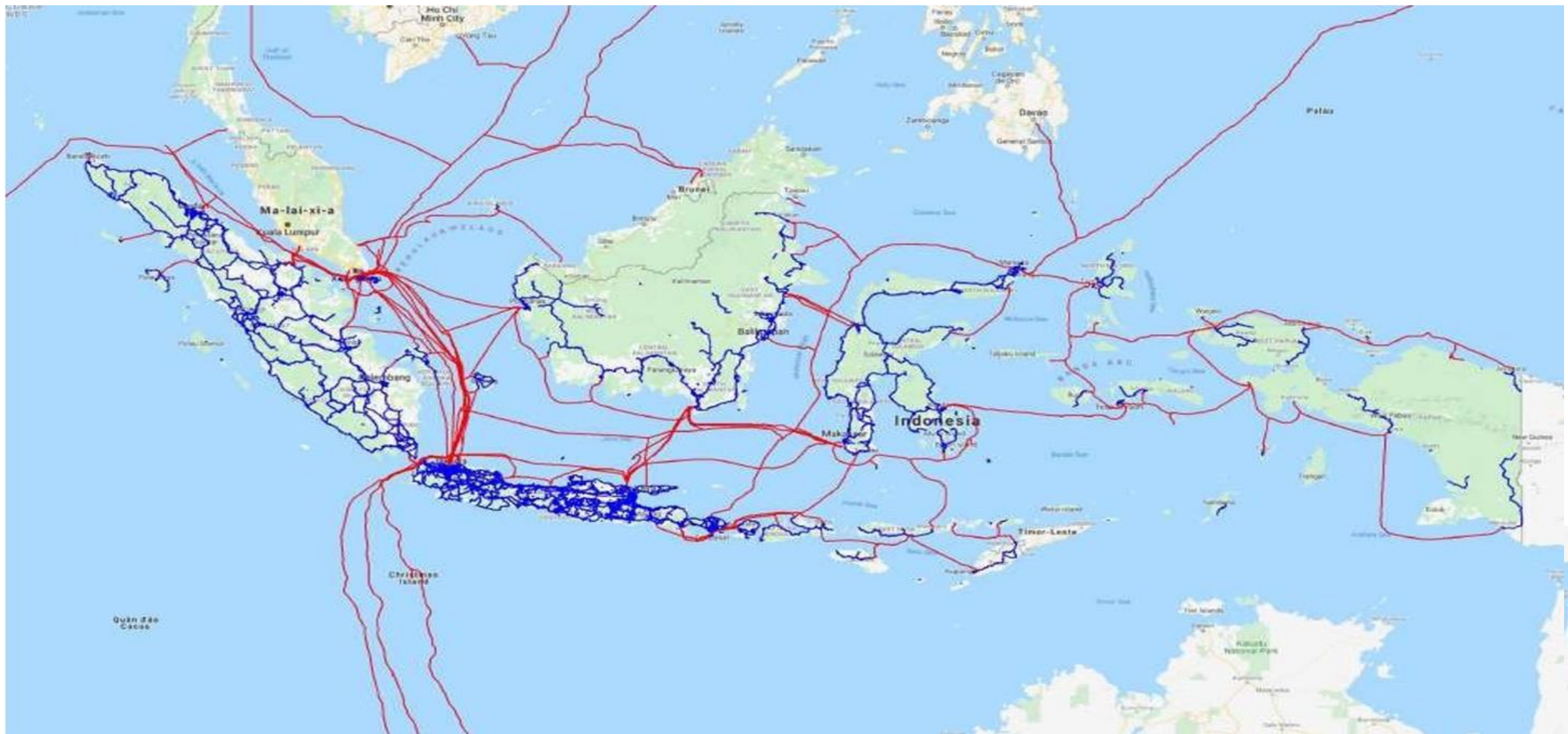
KESENJANGAN DIGITAL



CAKUPAN SINYAL DI DESA



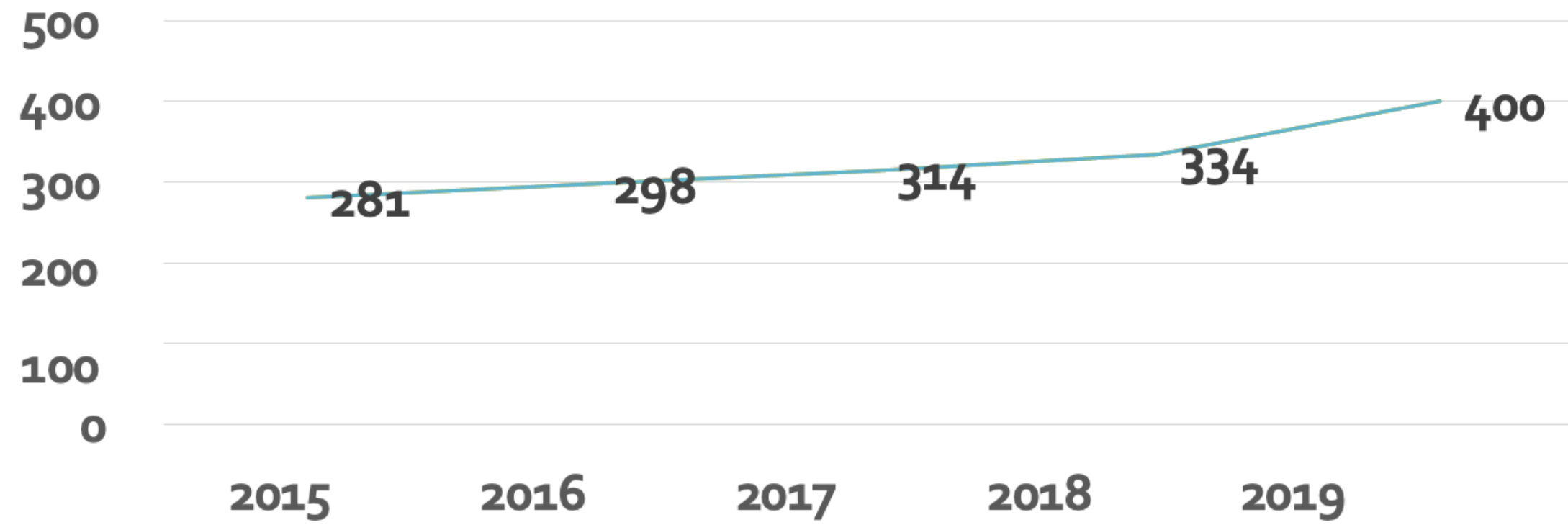
SEBARAN INFRASTRUKTUR JARINGAN FO



Jumlah Kabupaten/Kota
terdapat Fiber Optik = 497
Kab/Kota (96,69%)
Jumlah Kecamatan
terdapat Fiber Optik =
4.477 kecamatan (62,40%)
Jumlah Kelurahan/Desa
terdapat Fiber Optik =
29.708 Kab/Kota (35,70%)

Ket.	Jenis Kabel	Panjang (km)
—	FO SKKL	122.336
—	FO Inland	220.464

JUMLAH PENYELENGGARA ISP



Jumlah Penyelenggara ISP pada tahun 2019 terjadi kenaikan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan proses perizinan yang semakin mudah dan cepat melalui OSS

Sebaran PoP Penyelenggara ISP

Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih & Transparan



Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang transparan memastikan bahwa pejabat dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.



Kepercayaan & Legitimasi

Ketika tata kelola pemerintahan bersih dan transparan, maka akan terbangun kepercayaan antara pemerintah dan yang diperintah.



Efisiensi dan Efektivitas

Transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih baik atas operasi pemerintah, yang mengarah pada penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien.



Supremasi Hukum

Tata kelola pemerintahan yang bersih ditandai dengan kepatuhan terhadap aturan hukum



Pembangunan Ekonomi

Transparansi dan tidak adanya korupsi menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.



Inovasi dan Kemajuan

Pemerintahan yang transparan mendorong inovasi dengan memberikan aturan dan regulasi yang jelas.



Pentingnya Transformasi Digital pada Tata Kelola Pemerintahan



Peningkatan Efisiensi

Mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas



Transparansi dan Akuntabilitas

Memungkinkan pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat terhadap tindakan pemerintah



Inovasi dan Adaptabilitas

Memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan baru



Efektivitas Kebijakan Publik

Memastikan kebijakan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran

Ketahanan Nasional dalam Konteks Digital

1

Keamanan Siber sebagai Pilar Ketahanan Nasional

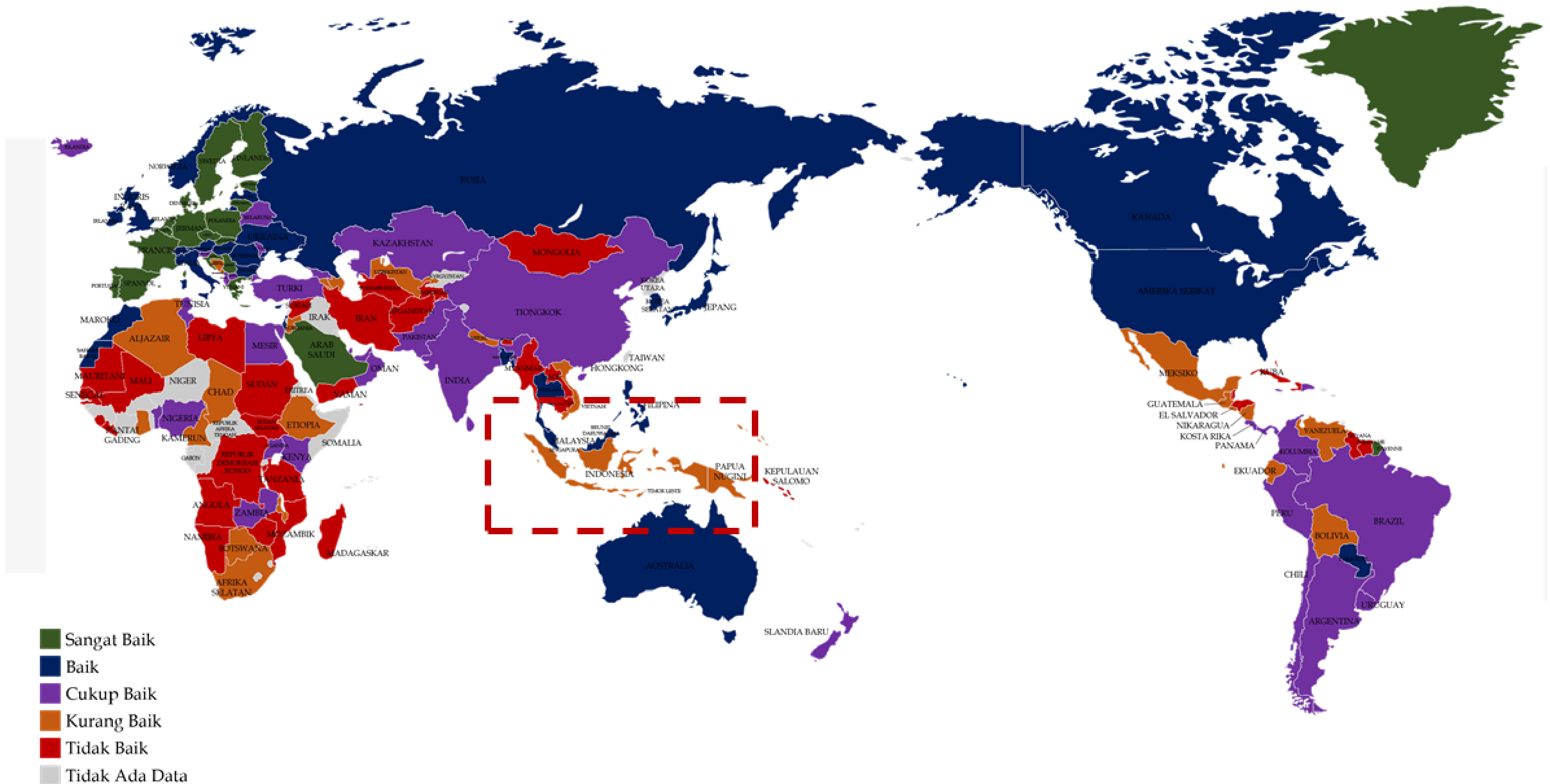
Keamanan siber harus menjadi fokus utama dalam ketahanan nasional karena ia secara langsung melindungi integritas dan kerahasiaan data sensitif, serta menjaga keberlangsungan operasional sistem pemerintahan dari ancaman siber.

2

Infrastruktur Digital yang Handal

·Infrastruktur digital yang handal adalah fundamental untuk menjaga keberlanjutan operasional pemerintahan. Infrastruktur ini mencakup jaringan komunikasi, server, data center, dan sistem penyimpanan data yang harus kuat dan tahan terhadap gangguan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar.

Penilaian Kapasitas Keamanan Siber



Kolaborasi dan Inovasi untuk Optimalisasi Transformasi Digital

1

Kolaborasi Multi-Stakeholder

- Kolaborasi multi-stakeholder adalah kunci sukses dalam menghadapi tantangan digital dan mengoptimalkan transformasi digital dalam pemerintahan. Setiap pemangku kepentingan membawa perspektif, sumber daya, dan keahlian unik yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan inisiatif digital.

2

Inovasi Teknologi

- Inovasi teknologi memainkan peran kunci dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan. Teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan big data memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasional mereka.

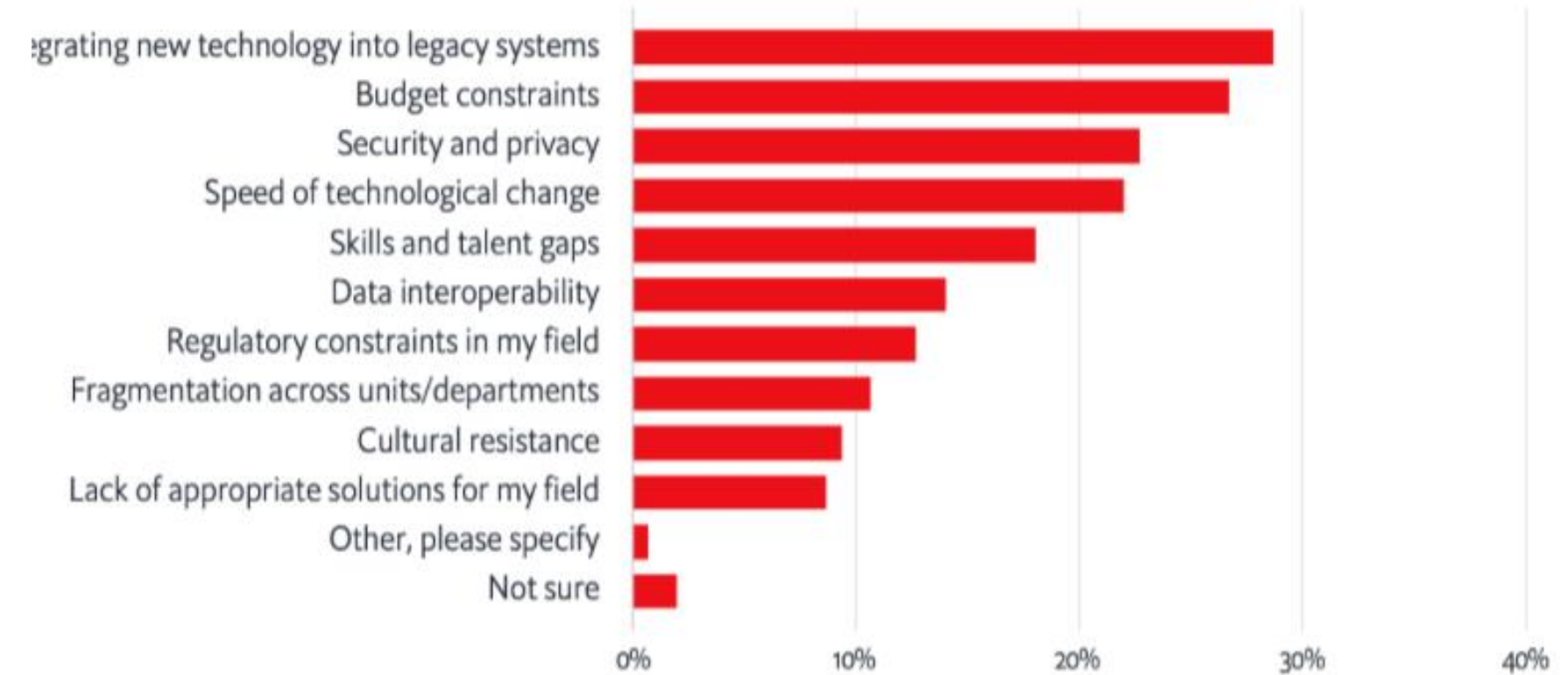
Bagaimana transformasi digital mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan?



Tantangan yang Dihadapi Dalam Menerapkan Transformasi Digital

- **Tantangan Integrasi dengan Sistem Lama:** 28,7% organisasi pemerintah menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem lama yang sudah ketinggalan zaman, yang sulit memenuhi standar interaksi digital modern.
- **Kendala Anggaran:** Anggaran yang terbatas merupakan hambatan terbesar kedua dalam transformasi digital (26,7%), terutama yang mempengaruhi departemen infrastruktur (38,9%) dan layanan keuangan (27,9%).
- **Hambatan yang Terus Berkembang:** Meskipun sistem lama dan keterbatasan anggaran merupakan masalah saat ini, masalah keamanan dan privasi diperkirakan akan menjadi hambatan terbesar (28,7%) dalam tiga tahun ke depan, yang didorong oleh meningkatnya ancaman siber.
- **Variasi Regional:** Tanggapan regional bervariasi, dengan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama di Malaysia dan Filipina (40%), sementara

What are the top barriers to implementing your organisation's digital transformation strategy to select up to two.



Tantangan yang Dihadapi saat Implementasi Strategi



Keterbatasan
Anggaran

Sistem Legacy

Resistensi terhadap
Perubahan

Keamanan dan
Privasi

Hambatan Regulasi
dan Hukum

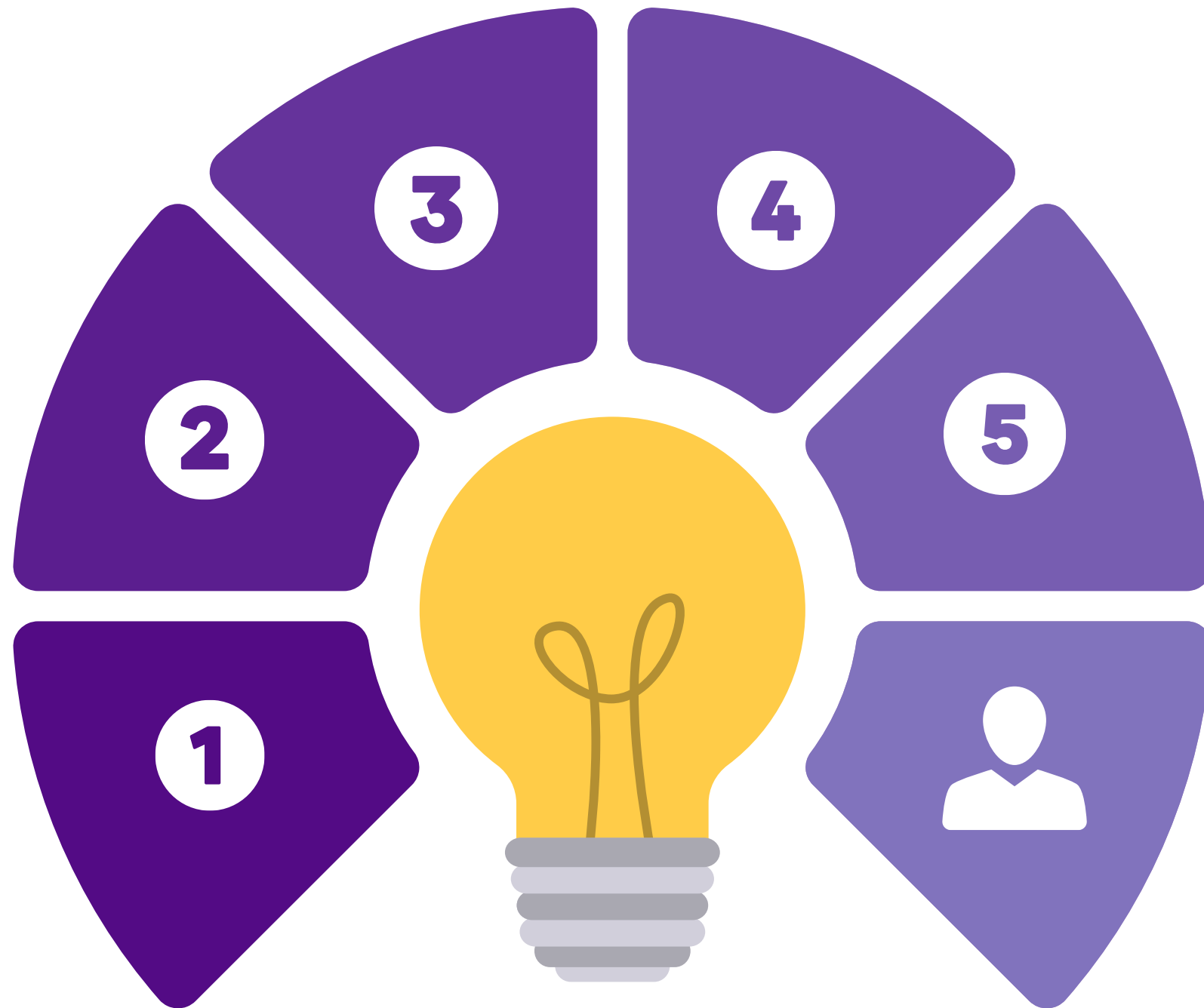
Interoperabilitas

Aksesibilitas

Transparansi dan
Akuntabilitas

Strategi Optimalisasi Transformasi Digital

(Lanjutan...)



1

Teknologi Kepatuhan terhadap Peraturan

Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan pemeriksaan dan pelaporan kepatuhan dapat membantu lembaga pemerintah mematuhi peraturan dan mencegah pelanggaran etika.

2

Analisis dan Pelaporan Data

Memanfaatkan analisis data untuk mendapatkan wawasan tentang operasi pemerintah dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan

3

Tindakan Keamanan Siber

Memperkuat keamanan siber untuk melindungi data dan sistem pemerintah sangat penting untuk menjaga integritas tata kelola digital dan mencegah ancaman siber

4

Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

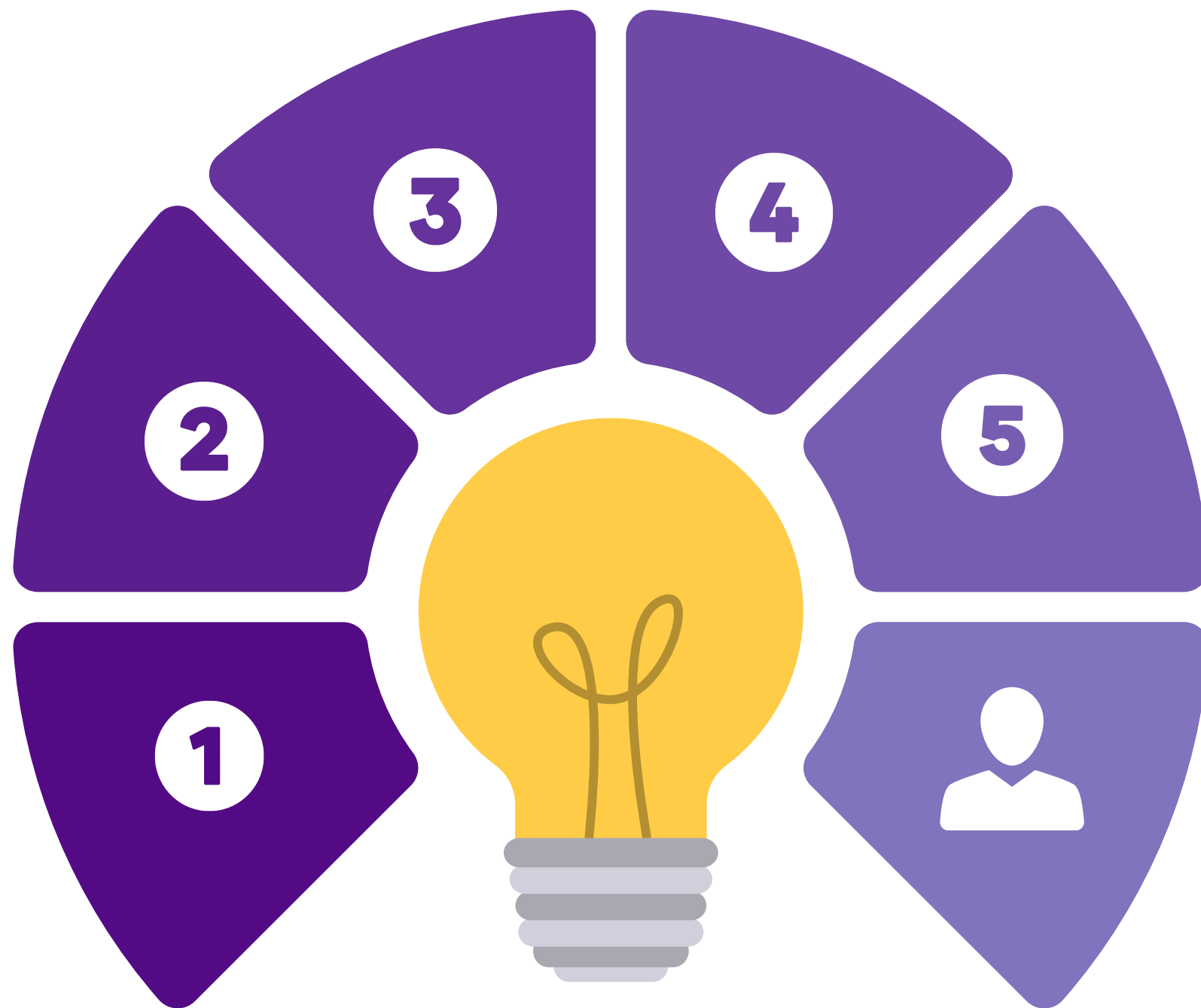
Berinvestasi dalam keterampilan digital pegawai pemerintah memastikan bahwa mereka dapat secara efektif menggunakan perangkat teknologi dan memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam peran mereka.

5

Kolaborasi Lintas Lembaga

Mendorong kolaborasi dan berbagi informasi antar lembaga pemerintah melalui platform digital dapat menghasilkan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih terkoordinasi dan transparan.

Strategi Optimalisasi Transformasi Digital



1

Inisiatif Data Terbuka

Menerapkan kebijakan data terbuka memungkinkan publikasi data pemerintah yang tidak sensitif

2

Platform Tata Kelola Elektronik

Mengembangkan platform online untuk memberikan layanan,

3

Manajemen Identitas Digital

Membangun sistem identitas digital yang aman dan andal dapat menyederhanakan akses layanan dan mengurangi kegiatan ilegal

4

Portal Transparansi Online

Membuat portal digital di mana kontrak, anggaran, dan metrik kinerja pemerintah tersedia untuk umum dapat mendorong transparansi dan memungkinkan pengawasan publik

5

Sistem Perlindungan Pelapor Pelanggaran

Menerapkan sistem digital yang melindungi pelapor dapat mendorong pelaporan kasus atau salah urus tanpa takut akan pembalasan.

Kesimpulan

Strategi optimalisasi transformasi digital dapat digunakan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini juga didukung dengan pentingnya peran transformasi digital terhadap tata kelola pemerintahan.

Dalam proses implementasinya, akan ditemukan beberapa tantangan/hambatan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan strategis, termasuk investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, memperbarui regulasi, mendorong budaya inovasi dan transparansi, serta memastikan bahwa inisiatif transformasi digital sejalan dengan tujuan lebih luas dari pemerintahan yang baik dan pelayanan publik.





Terima Kasih

Karena itu di dalam Lambang Perlawanan Nasional yang baru dibuat ini, masih diberi tulisan pengetahuan untuk penglihat supaya kita mengetahui, bahwa dengan besar-besarnya tanah air kita, geografis tanah Indonesia tanah air kita, sosial rakyat kita, masyarakat kita, ekonomi kita, kultur kita, semuanya ini kita di menjadi bekal untuk membangun dan memajukan perlawanan nasional kita.